

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan tugas akhir ini, dalam Bab V ini akan disampaikan kesimpulan mengenai penelitian ini. Berdasarkan Laporan Tugas Akhir "Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta"

5.1 Ringkasan Tugas Akhir

Prosedur penggajian merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu serta perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansial dan hukumnya. Apabila pelaksanaan penggajian dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada, sudah dipastikan jalannya kegiatan akan terminimalisir dari adanya kesalahan atau kecurangan. Pegawai yang mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan akan merasa termotivasi karena mendapatkan balas jasa yang adil dan layak.

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan dokumentasi. Sehingga penulis menuliskan Tugas Akhir ini berdasarkan fakta yang terjadi di tempat penulis melaksanakan praktik kerja lapangan. Data yang menjadi sumber dan dasar penulisan ini adalah menggunakan data primer dan sekunder.

Prosedur pembayaran gaji melibatkan berbagai fungsi untuk memastikan bahwa pegawai menerima gaji mereka secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan hukum yang berlaku. Beberapa fungsi yang terlibat dalam prosedur ini meliputi fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian berperan penting dalam mengelola data pegawai, seperti informasi tentang gaji pokok, tunjangan, potongan, jam kerja, dan status karyawan. Bagian kepegawaian juga bertanggungjawab untuk memperbarui data ini secara berkala, terutama saat terjadi perubahan seperti kenaikan jabatan/golongan atau adanya pegawai yang pensiun/mutasi. Data ini kemudian diserahkan kepada fungsi akuntansi untuk dihitung gaji bersih setiap pegawai, termasuk perhitungan pajak, tunjangan, dan potongan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, fungsi akuntansi adalah untuk membuatkan perintah

pengeluaran kas kepada fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan bertugas untuk mencairkan uang untuk kemudian dibayarkan kepada pegawai. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah daftar rinci gaji, rekapitulasi daftar gaji, daftar perubahan data pegawai, daftar KP4, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji, Surat Perintah Membayar (SPM), dan slip gaji. Catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah buku kas pembantu khusus gaji. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah laporan daftar gaji, laporan bukti karyawan, dan laporan pembayaran gaji. Dari hasil penelitian tentang fungsi-fungsi yang berkaitan dalam pelaksanaan penggajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga transaksi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, pelaksanaan penggajian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah cukup fungsional sesuai pada masing-masing bagian, serta sudah melaksanakan otorisasi dan pencatatan secara baik. Selain itu, praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi di setiap bidangnya.

Prosedur penggajian yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih kurang baik dilihat dari tidak memiliki prosedur sendiri dan hanya berpacu pada Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Meski terbatasnya informasi tentang prosedur penggajian sehingga alur penggajian kurang transparan dan tidak mudah dimengerti oleh pegawai lain, pelaksanaan penggajian tetap berjalan dengan baik dan tidak ada kekeliruan atau masalah sehingga seluruh pegawai dapat menerima haknya dengan layak. Dalam hal penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur penggajian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sudah baik, sehingga dokumen-dokumen tersebut sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah kepala bidang. Oleh karena itu, data akuntansi yang dihasilkan terjamin keandalannya dan ketelitiannya. Gaji adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan rutin kepada pegawai sebagai imbalan atas jasa yang sudah mereka kerjakan yang ditetapkan melalui bentuk persetujuan, Undang-Undang, dan peraturan yang berlaku. Kebijakan

mengenai penggajian mengikuti UMR (Upah Minimum Regional) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dilihat dari adanya pemberian tunjangan-tunjangan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dapat dilihat dari setiap transaksi yang berkaitan dengan proses penggajian harus disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang atas setiap dokumen yang digunakan.

Proses perhitungan daftar gaji dan upah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan mesin penghitung khusus. Serta penyusunan daftar gaji adalah menggunakan web SIPKD dengan cara menginputkan data pegawai untuk memudahkan penulisan yang berulang seperti nama karyawan, NIP, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikannya sebagai nilai plus karena dengan menggunakan teknologi ini dapat meminimalisir adanya kesalahan pada saat penulis data pegawai. Selain itu, banyaknya jumlah pegawai merupakan satu kendala yang membuat penulisan memakan banyak waktu. Dengan menggunakan SIPKD, akan mempersingkat waktu sehingga keterlambatan tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dan dari data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah bentuk pelaksanaan dari sistem yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gaji adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan uang yang dibayarkan secara teratur sebagai bentuk balas jasa atau imbalan dari hasil kerja/pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk keperluan kepegawaian atau manajerial, yang ditetapkan melalui bentuk persetujuan, undang-undang, peraturan serta diberikan atas perjanjian kerja.

5.2 Pengetahuan dan Wawasan Tugas Akhir

Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh melalui Tugas Akhir mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman mendalam terhadap topik penelitian, kemampuan analisis dan sintesis data, hingga keterampilan dalam merancang dan melaksanakan metodologi penelitian yang tepat. Tugas Akhir juga melibatkan pengembangan wawasan kritis, di mana mahasiswa harus mampu mengevaluasi

literatur yang relevan, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta mengajukan hipotesis atau solusi inovatif terhadap masalah yang diteliti.

Dari penyusunan laporan Tugas Akhir dengan judul *Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta* ini dapat diperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan yang membantu dalam lebih memahami tentang prosedur penggajian yang belum dikuasai sepenuhnya tentang komponen-komponen gaji yang diperoleh dari bekerja. Prosedur penggajian melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan bahwa pegawai menerima gaji mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui penelitian ini, penulis dapat mempelajari berbagai komponen dalam penggajian, seperti perhitungan gaji pokok, tunjangan, potongan pajak, potongan asuransi, dan kontribusi lainnya seperti iuran BPJS.

Penulis juga memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat laporan prosedur penggajian yang komprehensif dan tertib melalui aplikasi yang tersedia di situs web resmi SIPKD. Modul gaji ini akan dialokasikan untuk setiap pegawai yang tercatat dan terdaftar dalam aplikasi di instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan bagian dari program kompensasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan konsistensi eksternal yang kompetitif. Hasilnya, stabilitas pegawai meningkat secara signifikan karena tingkat turnover yang relatif rendah. Selain itu, kedisiplinan pegawai juga meningkat, karena penghargaan yang besar menyebabkan kesadaran dan kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan yang ada di antara staf. Pengetahuan tentang apa itu SIPKD, juga penulis dapatkan setelah penulis melakukan penelitian ini. Memahami bagaimana mengoperasikan SIPKD dan apa saja yang perlu diperhatikan pada saat menginput data pegawai untuk proses pembayaran gaji kepada pegawai yang telah bekerja sesuai dengan data yang terperinci yang telah dikumpulkan selama satu bulan kerja.

Dapat mengetahui dan lebih memahami bahwa dalam menyusun prosedur penggajian, terdapat proses yang harus ditempuh, seperti sistem akuntansi, metode akuntansi, dan catatan akuntansi yang digunakan dalam pembayaran upah dan tunjangan karyawan dengan pengurangan yang tercantum dalam slip gaji. Dapat

diperoleh juga informasi tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajian pada Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tidak langsung, penulis juga memperoleh wawasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan dalam proses penggajian. Ini mencakup pemahaman tentang undang-undang terkait ketenagakerjaan, seperti Upah Minimum Regional (UMR), hak-hak karyawan terkait cuti, lembur, dan tunjangan lainnya, serta peraturan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak penghasilan karyawan. Tugas Akhir ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penggajian, seperti manajemen data yang akurat, penanganan karyawan dengan status kontrak atau freelance, serta dampak teknologi informasi dalam memodernisasi dan mengintegrasikan sistem penggajian dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan.

Penelitian ini juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam mengevaluasi efektivitas prosedur penggajian yang ada. Secara keseluruhan, Tugas Akhir yang berfokus pada prosedur penggajian memberikan mahasiswa tidak hanya pemahaman teoritis yang mendalam, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola salah satu aspek kritis dari manajemen sumber daya manusia, yang sangat relevan dalam dunia kerja dan berpotensi memberikan dampak positif pada efisiensi operasional perusahaan.